

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aarce Tehupeiory, 2021, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Theo Huijbert, Filsafat Hukum, dalam, Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 1982. *Hukum Agraria, Himpunan Peraturan-Perundang Bidang Agraria*, Djambatan, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.
- J.J.H. Bruggink, 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Oleh Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Gunanegara. 2008, *Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat Teori Ilmu dan Jurisprudensi*. Jakarta: PT Tatanusa, Jakarta
- Gustav Radbruch, 1961 *Infuhrung in die Rechtswissenschaft*, K.F Koehler, Stuttgart
- Nihal Jayawickrama, 2006, *The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional & International Jurisprudence)*, Cambridge University Press, New York, hlm. 878-879
- O. Sitorus dan D. Limbong, 2004 *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakt, Bandung
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sukanti, 2016, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji, Medan,
- Termorshuizen-Arts, M., 2010, *Rakyat Indonesia Dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domes Di Masa Kolonial Dan Pengaruhnya Dalam Hukum Agraria Indonesia*, HuMa, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta: Kompas.
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani, Nusa Media, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penanggaran Terpadu;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseoran Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroran Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II;
- Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0176/PU.04.00 tentang Data Vertifikasi Warga Calon Penghuni Kampung Susun Bayam;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II.
- Surat Walikota Jakarta Utara Nomor e-0176/PU.04.00 tentang Data Vertifikasi Warga Calon Penghuni Kampung Susun Bayam.

C. Jurnal/Makalah

- Dhenes, I.M. (2016) Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten. Tersedia dari Repository Universitas Sultan Agung Semarang (<http://repository.unissula.ac.id/7029/>)

- Elita Rahmi. (2010). “Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 10. No. 3. September. hlm. 356, *available from*: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.104>, diakses tanggal 10 April tahun 2024.
- Hamzani, A. I., Idayanti, S., Indriasari, E., & Fuad, Z. M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 683-698.
- Hermayulis. (2000). “Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai Obyek Jaminan”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta. Volume 10.
- Harsono, B. (1990). Aspek Yuridis Penyediaan Tanah. *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor, 2
- Muhammad Yusrizal, 2017, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata* Volume 2 No. 1, hlm. 113-138, *available from*: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1143/11303>, diakses tanggal 08 Oktober tahun 2024.
- Pradana, A.K. (2018). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan. Tersedia dari Repository Universitas Brawijaya. (TES/346.044/PRA/p/2018/04190430).
- Rajaguguk, E. (2012). Serba-serbi Hukum Agraria: Tanah Untuk Kepentingan Umum, Larangan Alih Fungsi Tanah Pertanian, Landreform Tanah Pekarangan, Jakarta, Vol 1, 2012.
- Rohaedi, E., Insan, I. H., & Zumaro, N. (2019). Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *PALAR (Pakuan Law review)*, 5(2). DOI: [10.33751/palar.v5i2.1192](https://doi.org/10.33751/palar.v5i2.1192)
- Salsabella, S., & Widyastuti, T. V. (2024). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti

Untung. Pancasakti Law Journal (PLJ), 2(1), 47-56. DOI:
<https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.59>

Wahyuni, R., (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Pengusuruan Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM. Jurnal Yuridis. Vol. 9 No. 1. hlm 37-55. Diakses dari
<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/4170/pdf>

D. Sumber Internet

Ady Thea, 2021, “4 Penyempurnaan Substansi UU Pengadaan Tanah Melalui UU Cipta Kerja”, *available from:*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-penyempurnaan-substansi-uu-pengadaan-tanah-melalui-uu-cipta-kerja-lt60dad3643374/>

Alisa Q, 2021, “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf” *available from:*
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/?srsltid=AfmBOoqKOyZ3EJNLNEDwHgYfltOi77-doK-054BTDWQ5BSbG33OQH0XH> diakses tanggal 2 Januari 2025

CESCR. (2009). General Comment No. 20: Article 2 (2) Non-discrimination in Economic, Social and Cultural rights) UN Doc E/C.12/GC/20, paragraf 28, 29, 32., diakses dari
<https://digitallibrary.un.org/record/659980?v=pdf>

CNN Indonesia, 2022, “Sejarah JIS: Dari Era Foke, Jokowi hingga Anies Baswedan”, *available from:*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220507173513-20-793946/sejarah-jis-dari-era-foke-jokowi-hingga-anies-baswedan>,
 diakses tanggal 18 Desember tahun 2024

DetikFinance. (2022) “JIS Dinilai PSSI Tak Layak, Biaya Proyeknya Berapa Triliun?” *available from:* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6288592/jis-dinilai-pssi-tak-layak-biaya-proyeknya-berapa-triliun>, diakses tanggal 10 Desember Tahun 2024

Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, 2024, “Mengenal Kampung Bayam dan Konfliknya yang Tak Kunjung Usai”, Kompas, *available from:*

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/26/083000365/mengenal-kampung-bayam-dan-konfliknya-yang-tak-kunjung-usai> diakses pada tanggal 28 Maret tahun 2024.

Komnas HAM RI. *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak*. Jakarta. 2022. *available from:*

[https://www.komnasham.go.id/files/1671680840-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$WK34S.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1671680840-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$WK34S.pdf), diakses pada tanggal 19 Juni tahun 2024

Komnas HAM RI. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Komnas HAM RI, diakses dari

[https://www.komnasham.go.id/files/1659686119-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$72B3AL4.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1659686119-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$72B3AL4.pdf)

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2023, “PRESS RILIS: Tak Kunjung Mendapatkan Hak atas Unit Kampung Susun Bayam, Warga Kampung Bayam Gugat Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro” *available from*, <https://bantuanhukum.or.id/press-rilis-tak-kunjung-mendapatkan-hak-atas-unit-kampung-susun-bayam-warga-kampung-bayam-gugat-pemprov-dki-jakarta-dan-jakpro/>, diakses pada tanggal 28 Maret tahun 2024.

Nation Human Rights Intitutions, 2005, *A handbook for the National Human Rights Institution, ESCR Rights*, United Nations, Geneva & New York, *available from:*

<https://www.refworld.org/reference/manuals/un/1995/en/97867> , hlm. 118.

Prasetyo Donny. “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”. *available from:*

<https://dinastive.org/JMPISarticle/view/253> diakses pada tanggal 19 Juni tahun 2024.

Sekar Aqillah Indraswari, 2024, “Duduk Perkara Pengusiran Warga Kampung

Susun Bayam, Dulunya Korban Gusuran Lahan JIS”, *available*

from: <https://www.detik.com/properti/berita/d-7352945/duduk-perkara-pengusiran-warga-kampung-susun-bayam-dulunya-korban-gusuran-lahan-jis>, diakses tanggal 10 Juli tahun 2024.

Sembiring, Ira Gita Natalia (2021). “Atap Jakarta International Stadium Selesai

Dipasang, Bisa Dibuka Tutup Otomatis.” Kompas.com *available from:*

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/09/11492411/atap-jakarta-international-stadium-selesai-dipasang-bisa-dibuka-tutup>

Diakses tanggal 11 Desember Tahun 2024.

Vidya Prahassacitta, 2018, “Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls”

available from: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> diakses tanggal 12 Januari

2025

Vienna Declaration and Programme of Action, diadopsi oleh World Conference

on Human Rights pada 25 Juni 1993., diakses dari

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInter/est/vienna.pdf>